Katalog BPS: 4102004.3316

INDIKATOR INDIKA





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BLORA 2020

ISBN :-

 No. Publikasi
 : 33160.2133

 Katalog BPS
 : 4102004.3316

 Ukuran Buku
 : 18,2 cm x 25,7 cm

 Jumlah Halaman
 : x + 68 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pencetak:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Sumber Ilustrasi:

_

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Nurul Choiriyati, SST, MM
Penanggung Jawab :

Dewi Setyowati, MS

Penulis:

Muhamad Abdul Aziz, SST

Retabulasi:

Muhamad Abdul Aziz, SST

Tata Letak, Gambar Kulit dan Infografis :

Muhamad Abdul Aziz, SST

KATA PENGANTAR

Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2020 merupakan publikasi yang diterbitkan secara tahunan oleh BPS Kabupaten Blora. Publikasi ini menggunakan data yang utamanya bersumber dari publikasi Blora Dalam Angka, indikator kesejahteraan rakyat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), indikator ketenagakerjaan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta beberapa indikator strategis lainnya dari berbagai survei dan sensus.

Publikasi ini menyajikan perkembangan indikator kesejahteraan sosial yang mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar data disajikan secara *series* tahun 2018 sampai 2020 agar terlihat bagaimana tren perkembangan data-data tersebut.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan data kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Blora, Desember 2021 Kepala BPS Kabupaten Blora

Nurul Choiriyati, SST, MM

DAFTAR ISI

Halamar	n Publikasi	i
Tim Pen	yusun	iii
Kata Per	ngantar	i۷
Daftar Is	i	v
Daftar T	abel	V
Daftar G	ambar	ix
Bab I	Kependudukan	1
Bab II	Kesehatan	13
Bab III	Pendidikan	25
Bab IV	Ketenagakerjaan	35
Bab V	Perumahan	47
Bab VI	Pola Konsumsi	57
Bab VII	Kemiskinan	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Blora, 2010-2020	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora, 2015-2020	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora Menurut Kecamatan, 2020	7
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Blora, 2015-2020	8
Tabel 1.5	Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Partisipasi KB, 2018-2020	10
Tabel 1.6	Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Jenis Alat/Cara, 2018-2020	11
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Kabupaten Blora, 2020	16
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir, 2018-2020	18
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan, 2018-2020	19
Tabel 2.4	Alasan Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Saat Memiliki Keluhan Kesehatan, 2018-2020	19
Tabel 2.5	Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2018-2020	20
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Berusia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI, 2019-2020	22
Tabel 2.7	Persentase Penduduk Berusia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2020	23

Tabel 2.8	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2018-2020	23
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2018-2020	30
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018-2020	31
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018-2020	32
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018-2020	33
Tabel 4.1	Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan di Kabupaten Blora, 2018-2020	38
Tabel 4.2	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, 2020	46
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2018-2020	50
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2018-2020	50
Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, 2018-2020	51
Tabel 5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Perkapita, 2018-2020	52
Tabel 5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2018-2020	53
Tabel 6.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2018-2020	60
Tabel 6.2	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Pengeluaran 2018-2020	61
Tabel 6.3	Rata-Rata Konsumsi Energi, Protein, Lemak dan karbohidrat Perkanita Perhari 2018-2020	62

Tabel 7.1	Garis	Kemiskinan,	Indeks	Kedalaman	Kemiskinan	dan	Indeks	
	Kenar	ahan Kemiski	nan 200	06-2020				67

Hitles: III of akabi hos. 90 i.d.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Blora menurut Kecamatan, 2020	5
Gambar 1.2	Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2020	9
Gambar 2.1	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Blora, 2010-2020	16
Gambar 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan, 2018	20
Gambar 3.1	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Blora, 2010-2020	28
Gambar 3.2	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Blora, 2010-2020	29
Gambar 4.1	Perkembangan TPAK Kabupaten Blora, 2010-2020	39
Gambar 4.2	Perkembangan TPT Kabupaten Blora, 2010-2020	40
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2018-2020	41
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2018-2020	42
Gambar 4.5	Persentase Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal, 2018-2020	42
Gambar 4.6	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018-2020	43
Gambar 4.7	TPT Kabupaten Blora menurut Jenis Kelamin, 2018-2020	44
Gambar 4.8	TPT Kabupaten Blora menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018-2020	45
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Air Minum, 2019-2020	54

Gambar 7.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2020	66
Gambar 7.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2020	67

ntips://lipiorakab.hps.go.id

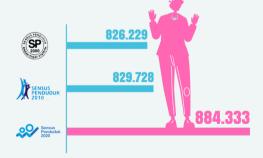


KEPENDUDUKAN

HASIL SENSUS PENDUDUK 2020

KABUPATEN BLORA





JUMLAH PENDUDUK BERTAMBAH

O D @bpskabblora

PENDUDUK LAKI-LAKI

LEBIH Banyak

Hasil SP 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin Kabupaten Blora sebesar

100,15

artinya dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Blora terdapat 100 atau 101 orang penduduk laki-laki



Hasil SP2020 menunjukkan kepadatan penduduk di Kabupaten Blora sebesar 486 jiwa per km persegi.

Kecamatan terpadat ada di Kec. Cepu dengan kepadatan sebesar 1.554 jiwa per km persegi.

486 JIWA PER KM2

nites: IIIblorakab hos. id

Dalam dinamika pembangunan, penduduk merupakan subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Di sisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakekat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena posisi penduduk bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Kependudukan sendiri selalu berkaitan erat dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal atau asset pembangunan apabila memiliki kualitas yang relatif baik. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga bisa menjadi beban dalam pencapaian tujuan pembangunan apabila kualitasnya rendah. Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata secara geografis dan komposisi sosial dan budaya yang sangat beragam juga dapat menjadi hambatan dalam pembangunan apabila tidak ada pengendalian dari pemerintah.

Sementara itu, dalam program pengendalian penduduk, pemerintah selaku perencana pembangunan maupun pelaku bisnis senantiasa membutuhkan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu. Misalnya data jumlah penduduk dan karakteristik, dapat digunakan pemerintah sebagai bahan dalam perencanaan penyediaan berbagai sarana umum, seperti perumahan, tempat ibadah, fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan dan tempat rekreasi. Sementara pelaku bisnis memerlukan data kependudukan dalam keperluan perencanaan produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja.

Kondisi Wilayah

Kabupaten Blora terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sebelah barat, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di sebelah utara,

Kabupaten Bojonegono dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, serta Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sebelah selatan.

Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Blora tercatat sebesar 182.059 hektar, dimana hampir separuhnya merupakan daerah hutan.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 mencapai 884.333 jiwa, atau bertambah sekitar 54 ribu jiwa sejak tahun 2010. Sedangkan dalam lima tahun terakhir, penduduk Kabupaten Blora diperkirakan mengalami pertambahan sekitar 32 ribu jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Blora dari tahun ke tahun memberikan sejumlah dampak, baik positif maupun negatif. Jumlah penduduk yang besar merupakan indikator tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai. Hal ini juga dikuatkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15 sampai 64 tahun) yang mendominasi sebesar 71,30 persen dari seluruh penduduk. Tetapi jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar juga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran apabila pertumbuhan lapangan kerja baru tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Tabel 1.1Jumlah Penduduk Kabupaten Blora, 2010-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
2010	829.728	97,29
2011	835.780	96,94
2012	840.206	96,95
2013	844.444	96,96
2014	848.369	96,93
2015	852.088	96,93
2016	855.573	96,93
2017	858.865	96,91
2018	862.110	96,86
2019	865.013	96,85
2020	884.333	100.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Besaran pertumbuhan penduduk akan berdampak terhadap laju pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Pengendalian penduduk yang baik akan mengurangi sejumlah permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, kualitas SDM, kejahatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dan aset penting dalam pembangunan. Pada periode 2010-2020, Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (LPP) Kabupaten Blora mencapai 0,62 persen. LPP tersebut lebih cepat dibandingkan periode 2000-2010 yang hanya sebesar 0,21 persen.

Dilihat dari komposisi jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin Kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 100,15. Artinya dari setiap 100 orang penduduk perempuan, ada sebanyak 100 atau 101 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Blora sedikit lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Blora adalah Randublatung, Jati dan Jiken. Total proporsi luas ketiga kecamatan tersebut terhadap luas wilayah Kabupaten Blora yaitu sebesar 30,91 persen dengan total proporsi jumlah penduduk di ketiga kecamatan tersebut hanya sebesar 18,67 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Blora adalah Blora Kota dengan jumlah penduduk sebesar 93.779 jiwa atau sebesar 10,60 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Blora, diikuti Randublatung dan Cepu dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 77.649 jiwa (atau 8,78 persen) dan 76.370 jiwa (atau 8,64 persen). Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil ada di Bogorejo dan Sambong yang masing-masing dihuni oleh sebanyak 24.805 jiwa (atau 2,80 persen) dan 27.659 jiwa (atau 3,13 persen).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blora juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, kepadatan penduduk Kabupaten sebanyak 468 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan pada tahun 2020, kepadatan penduduknya telah mencapai 486 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora, 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km²)
2015	852.088	1.820,59	468
2016	855.573	1.820,59	470
2017	858.865	1.820,59	472
2018	862.110	1.820,59	474
2019	865.013	1.820,59	475
2020	884.333	1.820,59	486

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Jika data kepadatan penduduk dirinci per kecamatan, maka tampak bahwa pada tahun 2020, Kecamatan Cepu dan Blora merupakan dua kecamatan terpadat di Kabupaten Blora. Kepadatan penduduk di Cepu dan Blora mencapai 1.554 jiwa per km² dan 1.175 jiwa per km². Adapun kecamatan selainnya hanya memiliki kepadatan penduduk di bawah 601 jiwa per km². Bahkan, ada dua kecamatan dengan kepadatan penduduk di bawah 300 jiwa per km², yaitu Jati dan Jiken yang mana mempunyai kepadatan penduduk hanya sebesar 268 jiwa per km² dan 228 jiwa per km².

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora
Menurut Kecamatan, 2020

, ====					
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km²)		
Jati	49.143	183,62	268		
Randublatung	77.649	211,13	368		
Kradenan	41.062	109,50	375		
Kedungtuban	57.447	109,85	523		
Cepu	76.370	49,14	1.554		
Sambong	27.659	88,75	312		
Jiken	38.374	168,16	228		
Bogorejo	24.805	49,80	498		
Jepon	62.824	107,72	583		
Blora	93.779	79,78	1.175		
Banjarejo	62.152	103,52	600		
Tunjungan	47.981	101,81	471		
Japah	35.310	103,05	343		
Ngawen	60.559	100,98	600		
Kunduran	66.189	127,98	517		
Todanan	63.030	128,73	490		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi dan rendahnya tingkat kelahiran di suatu wilayah. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kabupaten Blora pada tahun 2020 sebesar 19,82 persen. Sedangkan penduduk yang berusia di atas 64 tahun ada sebesar 8,87 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Blora.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam perencanaan pembangunan. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif. Begitupun sebaliknya, semakin rendah angka beban ketergantungan maka menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus

ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.4Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Blora, 2015-2020

	. ,			,
Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun	Angka Beban Ketergantungan
2015	22,98	68,00	9,02	47,06
2016	22,67	68,07	9,26	46,91
2017	22,37	68,11	9,52	46,82
2018	22,09	68,10	9,80	46,83
2019	21,82	68,06	10,12	46,92
2020	19,82	71,30	8,87	40,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Blora sedang menikmati bonus demografi dimana nilai angka beban ketergantungan selalu berada di bawah nilai 50. Bahkan hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Blora ternyata lebih besar dibandingkan perhitungan proyeksi dari Sensus Penduduk 2010. Pada tahun 2020, angka beban ketergantungan Kabupaten Blora sebesar 40,25. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 orang penduduk usia tidak produktif.

Dilihat dari proporsi penduduk menurut kelompok umur dalam lima tahun terakhir, struktur umur penduduk Kabupaten Blora terlihat sedang mengalami bonus demografi. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun).

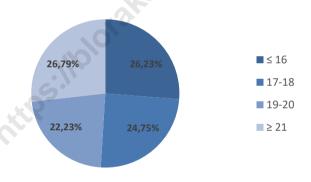
Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran yang tinggi bila disertai dengan kematian yang rendah akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran ini sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan

pertama ini merupakan umur pertama menikah untuk penduduk perempuan yang menandakan dimulainya masa reproduksi. Semakin muda usia seseorang saat melakukan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang pula masa reproduksinya. Hal ini memungkinkan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Gambar 1.2
Persentase Wanita Usia 10 Tahun ke atas Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020 di Kabupaten Blora, proporsi wanita berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur 16 tahun ke bawah ada sebesar 26,23 persen. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, hanya Kabupaten Wonosobo yang memiliki proporsi lebih besar dari Kabupaten Blora (29,55 persen). Tingginya persentase wanita yang menikah pada umur 16 tahun ke bawah di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama masih perlu ditingkatkan.

Penggunaan Alat/Cara KB

Sebagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penerapan program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu solusi selain dengan menunda umur perkawinan pertama. Program KB ditujukan untuk mewujudkan keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jarak kehamilan dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Tabel 1.5Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin menurut Partisipasi KB, 2018-2020

Partisipasi KB	2018	2019	2020
Pernah	13,49	13,36	11,22
Sedang	64,88	65,41	64,44
Tidak	21,63	21,21	24,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2020 di Kabupaten Blora menunjukkan ada sebesar 64,44 persen perempuan usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin yang merupakan peserta KB aktif, yaitu mereka yang sedang menggunakan alat atau cara KB. Adapun proporsi perempuan usia subur berstatus kawin yang tidak pernah menggunakan alat atau cara KB ada sebesar 24,34 persen pada tahun 2020.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (reversible) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.6Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Jenis Alat/Cara, 2018-2020

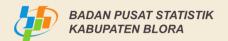
Alat/Cara Kontrasepsi	2018	2019	2020
Kontrasepsi pemanen (MOW/tubektomi, MOP/vasektomi)	2,99	5,37	3,72
AKDR/IUD/Spiral	7,46	6,93	4,83
Suntikan KB	61,45	53,39	63,27
Susuk KB/Implan	9,13	13,27	13,69
Pil KB	13,26	17,14	12,05
Kondom/Karet KB/ Intravag/Tissue	2,22	2,44	0,97
Lainnya	3,49	1,46	1,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Suntik KB merupakan alat/cara KB yang paling diminati oleh peserta aktif KB. Meskipun demikian, proporsi pengguna suntik KB kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 setelah mengalami tren menurun pada periode 2017-2019. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan ada sebesar 63,27 persen peserta aktif KB yang menggunakan suntik KB. Suntik KB dikenal sebagai alat/cara KB yang relatif praktis, mudah pemakaiannya, murah dan mudah didapatkan. Selain itu akseptor cenderung tidak malu/risih pada saat pemasangan dan mudah bagi akseptor untuk berhenti jika suatu saat menghendaki.

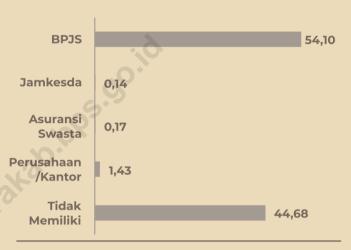
Sementara itu penggunaan Pil KB justru mengalami penurunan setelah pada periode sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, sebesar 12,05 persen peserta aktif KB di Kabupaten Blora memilih penggunaan pil KB sebagai

alat/cara KB. Adapun penggunaan alat/cara KB yang bersifat permanen seperti MOW/tubektomi ataupun MOP/vasektomi mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 proporsi penggunanya hanya sebesar 3,72 persen.



SEJAUH MANA JANGKAUAN JAMINAN KESEHATAN DI BLORA?

SEPARUH LEBIH PUNYA BPJS



Proporsi penduduk menurut jaminan kesehatan yang dimiliki, 2020 (dalam persen)



Menggunakan Jamkes 28,28% 71,72%

Tanpa Jamkes

28 DARI 100 ORANG YANG BEROBAT JALAN SUDAH MENGGUNAKAN JAMKES nites: IIIblorakab hos. id

nites: IIIblorakab hos. id

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga terkait erat dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, maka akan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut.

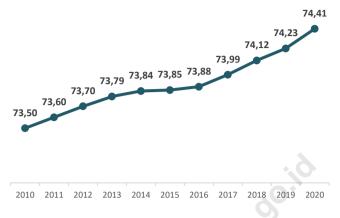
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, diantaraya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, serta memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti angka kesakitan dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang ditolong oleh tenaga medis waktu dilahirkan, persentase penduduk yang berobat ke pusat pelayanan kesehatan, dsb.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari sejumlah indikator, di antaranya adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dan angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. AHH atau *Life Expectancy* (e^0) didefinisikan sebagai rerata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Hasil Susenas Maret 2020 di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blora semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mana ditandai dengan peningkatan AHH di Kabupaten Blora. BPS mencatat bahwa AHH Kabupaten Blora 2010 sebesar 73,50 tahun dan telah meningkat menjadi 74,41 tahun di 2020.

Gambar 2.1
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Blora, 2010-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Peningkatan AHH ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dilakukan pemerintah dengan turut serta menggandeng peran aktif masyarakat dan swasta.

Tabel 2.1Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Kabupaten Blora, 2020

g					
Indikator	2018	2019	2020		
% Penduduk yang Memiliki	Keluhan Kesehatan				
Laki-Laki	32,17	43,82	44,98		
Perempuan	37,10	48,93	47,04		
Laki-Laki + Perempuan	34,67	46,42	46,03		
Angka Kesakitan					
Laki-Laki	16,24	24,11	23,54		
Perempuan	16,83	25,68	24,45		
Laki-Laki + Perempuan	16,54	24,91	24,00		
	Sumber : Badan Pusat :	Statistik Kabupaten Blora			

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), *Morbidity Rate* atau angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas seharihari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Pada tahun 2020, sebesar 46,03 persen penduduk Kabupaten Blora memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Proporsi perempuan yang memiliki keluhan kesehatan lebih besar nilainya dibandingkan proporsi laki-laki yang memiliki kesehatan, yaitu 47,04 persen berbanding 44,98 persen. Adapun angka kesakitan Kabupaten Blora mencapai 24,00 persen. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir yang didekati dengan penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan merasa aktivitas sehariharinya terganggu karena keluhan kesehatannya tersebut. Dilihat tren dalam tiga tahun terakhir, baik proporsi penduduk Kabupaten Blora yang memiliki keluhan kesehatan maupun angka kesakitan, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan peningkatan di tahun 2020 relatif signifikan dibandingkan setahun sebelumnya.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga turut dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan tersebut dapat berupa rumah sakit, puskesmas, pustu maupun praktik tenaga kesehatan lainnya. Beberapa hal dapat menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan sarana kesehatan ini, diantaranya adalah jarak tempat tinggal ke sarana kesehatan, ketersediaan biaya dan kualitas pelayanan. Salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan ini adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel 2.2Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir, 2018-2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-laki	42,83	46,56	41,26
Perempuan	44,22	49,40	44,38
Laki-Laki + Perempuan	43,59	48,08	42,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa 42,88 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian melakukan berobat jalan. Proporsi tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat 48,08 persen. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa proporsi perempuan yang berobat jalan lebih besar dibandingkan proporsi penduduk laki-laki yang berobat jalan.

Salah satu faktor yang mendorong penduduk dengan keluhan kesehatan untuk mempertimbangkan keputusan berobat jalan adalah ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan, seperti jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Dari beberapa alternatif fasilitas kesehatan, ternyata praktik dokter/bidan lebih diminati oleh penduduk di Kabupaten Blora. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa 64,29 persen penduduk yang berobat jalan memilih praktik dokter/bidan sebagai tempat mereka berobat jalan. Kemudahan akses, kualitas penanganan dan biaya yang relatif terjangkau disinyalir menjadi alasan utama bagi penduduk untuk memilih praktik dokter/bidan. Adapun fasilitas kesehatan lainnya yang banyak diminati oleh penduduk Kabupaten Blora adalah puskesmas/pustu dan klinik/praktek dokter bersama, dimana proporsinya mencapai 22,38 persen dan 10,10 persen di tahun 2020.

Tabel 2.3Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan, 2018-2020

Tempat Berobat Jalan	2018	2019	2020
RS Pemerintah	4,51	4,25	2,70
RS Swasta	2,16	3,19	2,02
Praktik Dokter/Bidan	60,32	71,29	64,29
Klinik/Praktik Dokter Bersama	10,70	10,38	10,10
Puskesmas/Pustu	21,44	15,49	22,38
UKBM	2,18	1,84	1,82
Praktik Batra/Alternatif	1,30	1,23	1,38
Tempat Lainnya	1,31	0,54	0,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Meskipun fasilitas kesehatan di Kabupaten Blora relatif mudah dijangkau aksesnya, masih ada sebagian penduduk yang memilih untuk tidak berobat jalan walaupun memiliki sejumlah keluhan kesehatan. Sebesar 60,96 persen di antara mereka memilih mengobati sendiri pada saat sakit dan 35,95 persen di antara mereka merasa tidak perlu untuk berobat jalan.

Tabel 2.4Alasan Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Saat Memiliki Keluhan Kesehatan, 2018-2020

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	2018	2019	2020
Tidak punya biaya berobat	2,73	0,93	0,43
Tidak ada biaya transport	0,24	0,00	0,27
Tidak ada sarana transportasi	0,00	0,00	0,16
Waktu tunggu pelayanan lama	0,35	0,00	0,23
Mengobati sendiri	70,16	64,50	60,96
Tidak ada yang mendampingi	0,27	0,00	0,27
Merasa tidak perlu	25,80	32,97	35,95
Lainnya	0,45	1,60	1,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Jaminan Kesehatan

Dalam rangka memberi keringanan akses biaya pengobatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan ini diharapkan fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia bertujuan mengatasi kendala

biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Tabel 2.5Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2018-2020

		, ,	
Jenis Jaminan Kesehatan	2018	2019	2020
BPJS PBI	33,32	37,10	F4.10
BPJS Non-PBI	8,39	14,51	54,10
Jamkesda	2,47	0,89	0,14
Asuransi Swasta	0,83	0,73	0,17
Perusahaan/Kantor	1,08	1,72	1,43
Tidak Memiliki	54,23	46,57	44,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas Maret 2020, lebih dari 50 persen penduduk Kabupaten Blora telah memiliki jaminan kesehatan. Sebesar 54,10 persen penduduk memiliki BPJS, baik sebagai BPJS PBI maupun BPJS Non-PBI. Adapun proporsi penduduk Kabupaten Blora yang belum memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2020 ada sebesar 44,68 persen.

Gambar 2.2
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan, 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Kemudian dalam penggunaannya, Susenas Maret 2020 menunjukkan sebesar 71,72 persen penduduk Kabupaten Blora yang berobat jalan masih belum menggunakan jaminan kesehatan. Meskipun demikian, proporsi penduduk yang berobat dengan menggunakan jaminan kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kesehatan Ibu dan Bayi

Seorang ibu, memegang kunci penting dalam kehadiran penerus-penerus yang sehat dan berkualitas. Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan penggunaan ASI bagi balita. Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Hasil Susenas Maret 2020 di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa dari sebesar 60,95 persen dari seluruh baduta (penduduk berumur 0-23 bulan) telah diberi ASI selama 6-23 bulan dengan rata-rata lama pemberian ASI sebesar 10,32 bulan.

Tabel 2.6Persentase Penduduk Berusia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI, 2019-2020

	7 7	,
Pemberian ASI	2019	2020
Tidak Pernah Disusui	9,38	2,43
Pernah Disusui		
- <6 bulan	29,00	36,62
- 6-23 bulan	71,00	60,95
Rata-rata Lama Disusui (dalam bulan)	10,91	10,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Walaupun ada sebagian pihak yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi, tetapi imunisasi telah terbukti dapat meningkatkan kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu. Imunisasi merupakan program pencegahan, sebagai benteng untuk menangkal suatu jenis penyakit tertentu.

Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, HB, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap pada penduduk berumur 0-59 bulan di Kabupaten Blora mencapai 64,68 persen. Jika dilihat dari jenis imunisasinya, dari seluruh penduduk berumur 0-59 bulan di Kabupaten Blora yang pernah mendapat imunisasi, sebesar 94,73 persen telah menerima imunisasi BCG, 89,75 persen telah menerima imunisasi DPT, sebesar 93,51 persen telah menerima imunisasi polio, sebesar 70,02 persen telah

menerima imunisasi campak/morbilli, dan sebesar 94,70 persen telah menerima imunisasi Hepatitis B.

Tabel 2.7

Persentase Penduduk Berusia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi
Menurut Jenis Imunisasi. 2020

Jenis Imunisasi	2019	2020
BCG	93,77	94,73
DPT	92,35	89,75
Polio	94,16	93,51
Campak/Morbili	73,52	70,02
Hepatitis B	95,18	94,70
Imunisasi Lengkap	58,29	64,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan.

Tabel 2.8

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun
yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2018-2020

7 . 0			,
Penolong Kelahiran Terakhir	2018	2019	2020
Dokter	37,45	42,88	45,74
Bidan	59,95	57,12	52,22
Perawat	2,60	0,00	2,04
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Dukun Beranak/Paranji	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa sebesar 45,74 persen penolong persalinan terakhir di Kabupaten Blora adalah dokter kandungan dan 52,22 persen di antaranya adalah bidan. Hasil Susenas Maret 2018-2020 tidak menemukan adanya penolong persalinan oleh dukun tradisional dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Blora tentang pentingnya keberadaan tenaga medis dalam pertolongan persalinan.

ntips://localkab.bps.do.id



POSISI PENDIDIKAN BLORA DI EKS KARESIDENAN PATI



RATA-RATA LAMA SEKOLAH MASIH TERENDAH SE EKS KARESIDENAN PATI







PROPORSI IJAZAH TERTINGGI MINIMAL S-1
POPULASI PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS

nites: IIIblorakab hos. id

nites: IIIblorakab hos. id

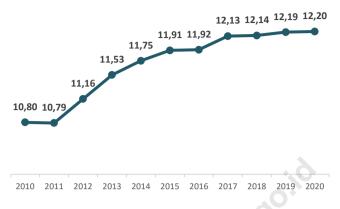
Pendidikan menjadi salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (*SDG's*) dalam *goal* ke–4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 4 ini dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Disamping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan dengan berbagai upaya seperti pembangunan sarana prasarana sekolah, program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Sampai saat ini sektor pendidikan masih menjadi prioritas dalam pembangunan karena masih banyaknya masalah mendasar dalam bidang pendidikan, diantaranya angka putus sekolah masih cukup tinggi dan kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Gambar 3.1
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Blora, 2010-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

HLS Kabupaten Blora tahun 2020 sebesar 12,20 tahun. Artinya secara ratarata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 di Kabupaten Blora memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,20 tahun atau setara dengan SMA/Sederajat atau semester awal jenjang perguruan tinggi.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. RLS digunakan untuk pada IPM dengan metode lama maupun baru guna mengukur pada dimensi pendidikan. Tetapi terdapat

perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan dari metode baru, RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar 3.2

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Blora, 2010-2020

5,50 5,77 5,83 5,90 6,02 6,04 6,18 6,45 6,46 6,58 6,83

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RLS Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai 6,83 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Blora rata-rata telah dapat menempuh pendidikan selama 6,83 tahun atau setara lulusan SD dan menginjak jenjang SMP/Sederajat kelas 1. Dilihat dari kecenderungan sepuluh tahun terakhir, RLS Kabupaten Blora selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang, semakin luas pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Telah dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada mata rantai tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan/keahlian semakin meningkat dan akan

semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini disinyalir dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penghasilan tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 3.1Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2018-2020

Ijazah Tertinggi	2018	2019	2020
Tidak Punya Ijazah	27,88	27,73	25,93
SD Sederajat	30,39	27,18	26,27
SMP Sederajat	22,04	21,57	22,38
SMA Sederajat	9,81	18,12	19,63
Diploma	0,96	1,04	0,74
S1, S2, S3	3,15	4,37	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa 25,93 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Blora tidak memiliki ijazah formal. Sedangkan proporsi penduduk yang memiliki ijazah setingkat SD ada sebesar 26,27 persen. Meskipun demikian, ada kecenderungan bahwa proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan dalam tiga tahun terakhir.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan indikator-indikator tersebut akan mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Umur pendudukan dalam penghitungan APS pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA/SMK. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018-2020

APS	2018	2019	2020
7-12	99,51	99,77	99,98
13-15	98,09	96,11	99,04
16-18	73,22	69,65	73,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Blora cukup menggembirakan dimana proporsinya selalu di atas 99 persen dalam tiga tahun terakhir dengan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Begitupun dengan APS penduduk usia 13-15 tahun dan APS penduduk usia 16-18 tahun yang turut mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu dari 96,11 persen menjadi 99,04 persen untuk APS 13-15 tahun dan 69,65 persen menjadi 73,13 persen untuk APS 16-18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini

hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya sehingga APM akan selalu lebih kecil dibandingkan APS. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK.

Tabel 3.3Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018-2020

АРМ	2018	2019	2020
SD	96,32	97,77	95,93
SMP	75,35	79,84	76,43
SMA	57,33	59,35	57,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Dalam tiga tahun terakhir, APM di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Blora terlihat fluktuatif. APM di setiap jenjang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2019, tetapi kemudian kembali turun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, APM SD Kabupaten Blora mencapai 95,93 persen, yang berarti sebesar 95,93 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Blora sedang bersekolah di jenjang SD/Sederajat. Adapun APM SMP Kabupaten Blora sebesar 76,43 persen dan APM SMA Kabupaten Blora sebesar 57,23 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio atau perbandingan jumlah siswa yang sedang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, besarnya APK bisa melebihi 100 persen karena angka ini tidak memperhatikan faktor umur. Kondisi ini menggambarkan adanya kemungkinan siswa yang tinggal kelas dan siswa terlambat atau terlalu cepat memasuki jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.4Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun, 2018-2020

АРК	2018	2019	2020
SD	106,22	109,67	107,70
SMP	91,70	95,22	96,01
SMA	94,12	86,65	87,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa ada penurunan APK SD di tahun 2020. Sebaliknya, APK SMP dan APK SMA justru mengalami kenaikan pada tahun 2020. Fenomena naik turunnya APK tersebut menunjukkan bahwa ada sejumlah penduduk dari kelompok umur 7-12 tahun yang telah beranjak naik ke jenjang SMP sehingga proporsi APK SMP meningkat. Begitupun dengan proporsi APK SMA yang mengalami peningkatan karena menerima lulusan dari penduduk kelompok umur di bawah 16 tahun yang telah masuk SMA.

httips://piakab.hps.go.id



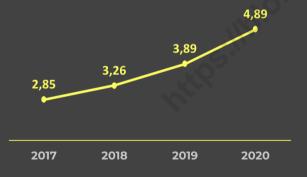
KETENAGAKERJAAN

POTRET KETENAGAKERJAAN BLORA

DI TAHUN PERTAMA PANDEMI



PENGANGGUR MAKIN BERTAMBAH





Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak cukup luas untuk menampung banyaknya pencari kerja. Dalam empat tahun terakhir, TPT Kabupaten Blora terus meningkat, bahkan melonjak sebesar satu persen poin akibat pasar tenaga kerja yang terkaget dalam menghadapi datangnya pandemi sehingga timbul gelombang PHK di tahun 2020.

8 DARI 100 PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK COVID-19 **6.932** Pengangguran karena Covid-19

2.286 Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19

3.087 Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19

Penduduk dengan
Pengurangan Jam Kerja
karena Covid-19

684.356 Jumlah Penduduk Usia Kerja nites: IIIblorakab hos. id

nites: IIIblorakab hos. id

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* yang merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok

berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang ikut berpartisipasi dalam lapangan kerja, baik statusnya bekerja maupun pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terkait dengan kegiatan bekerja secara produktif, melainkan melakukan kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Blora yang termasuk dalam usia kerja pada Agustus 2020 sebanyak 684.356 orang. Dari jumlah tersebut, yang tergolong dalam angkatan kerja sejumlah 492.071 orang yang terdiri dari 468.013 orang penduduk yang bekerja dan 24.058 orang penduduk yang menganggur. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 5,23 persen dari tahun sebelumnya dan jumlah orang yang menganggur meningkat sebesar 33,63 persen dari tahun sebelumnya.

Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan di Kabupaten Blora, 2018-2020

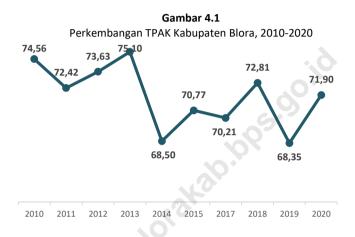
	V 1 1111	Biatair ai nasapateir Sio	
Kegiatan Utama 2018		2019	2020
Penduduk Usia Kerja	672.444	677.045	684.356
Angkatan Kerja	489.604	462.773	492.071
Bekerja	473.665	444.769	468.013
Menganggur	15.939	18.004	24.058
Bukan Angkatan Kerja	182.840	214.272	192.285

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan melalui gambaran tentang besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kendati demikian, analisis TPAK semata tanpa variabel lainnya kurang menarik karena TPAK tidak dapat menggambarkan baik buruknya

kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang tinggi karena proporsi penduduk bekerja yang besar bisa memberikan gambaran kasar tentang penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sedangkan TPAK yang tinggi karena proporsi penduduk menganggur yang besar justru menggambarkan suatu fenomena sulitnya tenaga kerja untuk terserap ke dalam pasar.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora Catatan: Data 2016 tidak tersedia

TPAK Kabupaten Blora selama sepuluh tahun terakhir cukup fluktuatif. Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Blora pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,90 persen, dibandingkan setahun sebelumnya yaitu sebesar 68,35 persen. TPAK 2020 menggambarkan bahwa sebesar 71,90 persen dari jumlah penduduk usia kerja aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), juga biasa digunakan dalam analisis angkatan kerja khususnya untuk mengukur pengangguran. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka ini tidak mencakup

mereka yang bersekolah atau mengurus rumah tangga karena mereka tidak termasuk dalam angkatan kerja. Dalam formulasinya, TPT berasal dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 4.2 Perkembangan TPT Kabupaten Blora, 2010-2020 6,90 6,23 4.89 3,89 3,26 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2019 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora Catatan : Data 2016 tidak tersedia

TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan juga dapat tercermin dari TPT. Tingginya TPT dapat mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang tersedia tidak cukup luas untuk menampung banyaknya pencari kerja Dalam empat tahun terakhir. Hasil Sakernas Agustus 2017-2020 menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Blora memiliki kecenderungan meningkat. Tercatat angka TPT Kabupaten Blora di tahun 2020 sebesar 4,89 persen, atau naik dari TPT 2019 sebesar 3,89 persen.

Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh/membantu memperoleh pendapatan/keuntungan/upah/gaji. Secara absolut, walaupun TPT meningkat, jumlah penduduk bekerja pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak sebanyak peningkatan pada tahun sebelumnya (tahun 2019 terhadap 2018). Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya, baik menurut lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, maupun pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

2018 45,11 18,19 36,70

2019 41,17 20,68 38,15

2020 47,51 17,42 35,06

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2018-2020

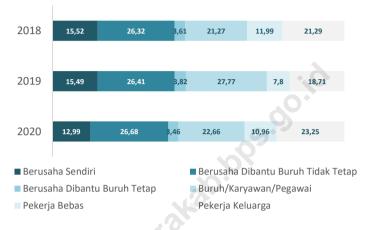
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Gambar 4.3 menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha 3 kategori.

Selama periode 2018 - 2020, kategori pertanian yang sebelumnya sempat menurun ternyata pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dalam hal proporsi penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, kategori manufaktur dan jasa yang sebelumnya meningkat justru mengalami penurunan. Pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur

dan jasa dan membuat pekerja kembali beralih ke sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanian menjadi salah satu lapangan usaha yang paling tahan terhadap dampak pandemi Covid-19.

Gambar 4.4Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Gambar 4.4 di atas menunjukkan penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama. Sebagian besar penduduk bekerja di tahun 2020 berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar. Proporsi status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar ini selalu meningkat sejak 2018.

Gambar 4.5
Persentase Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal/Informal, 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Gambar 4.5 menunjukkan penduduk bekerja berdasarkan kegiatan formal/informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dan informal secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerjaan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh, karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dan informal secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerjaan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh, karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

2018 58,93 16,67 8,96 9,11 6,34 2019 53,30 19,51 9,65 10,00 7,54 2020 50,13 20,95 10,82 11,11 6,99

SMP

Gambar 4.6
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

SMK

SMA

Diploma/Universitas

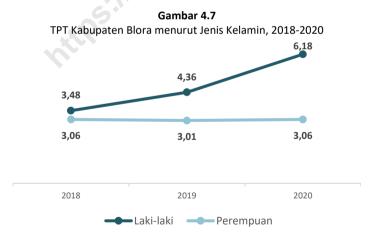
Penyerapan tenaga kerja hingga status 2020 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu SMP ke bawah dengan persentase lebih dari 70 persen. Namun, jika dilihat trennya selama periode 2018-2020, proporsi penduduk bekerja dengan pendidikan rendah mengalami penurunan,

■ SD ke bawah

khususnya penduduk dengan pendidikan SD ke bawah (Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD). Sebaliknya, penduduk bekerja dengan pendidikan menengah/tinggi selama periode 3 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Penduduk yang berpendidikan rendah umumnya bekerja pada sektor pertanian karena pada umumnya sektor tersebut tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu.

Karakteristik Penganggur

Dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi daripada TPT perempuan sejak tahun 2018. Bahkan, peningkatan TPT pada tahun 2020 lebih tinggi terjadi pada penduduk lakilaki dibanding penduduk perempuan. Padahal jika disandingkan dengan peningkatan TPAK, TPAK perempuan lebih tinggi dibanding TPAK laki-laki. Hal ini memberikan indikasi bahwa peningkatan TPAK pada perempuan disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk perempuan yang bekerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenjang pendidikan SMA ke bawah mengalami peningkatan TPT pada tahun 2020. Peningkatan TPT pada jenjang pendidikan SMA adalah paling tinggi sehingga membuat TPT-nya

menjadi yang paling tinggi di antara jenjang pendidikan lainnya. Sebaliknya, TPT pada jenjang pendidikan SMK dan diploma/universitas mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pengangguran dengan jenjang pendidikan tertinggi SMK yang sebelumnya selalu tertinggi telah secara konsisten menunjukkan penurunan TPT yang cukup signifikan. Selanjutnya, TPT pada jenjang pendidikan diploma/universitas adalah yang paling rendah di antara jenjang pendidikan tertinggi lainnya.

Gambar 4.8 TPT Kabupaten Blora menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018-2020 13,94 11,54 13.30 9,94 6,72 4,49 2,40 1,56 1.16 0.78 2018 2019 2020 SD ke Bawah Diploma/Universitas Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 4.2Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Keria. 2020

Dampak Covia 15 ternadap i enadadik Osia Kerja, 2020				
Komponen	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19			
Pengangguran ¹ karena Covid-19	6.932			
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² karena Covid-19	3.087			
Sementara Tidak Bekerja ³ karena Covid-19	2.286			
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	43.587			
Total	55.892			
Penduduk Usia Kerja	684.356			
Proporsi terhadap Penduduk Usia Kerja (dalam persen)	8,17			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Catatan: ¹ Penganggur yang pernah berhenti karena Covid-19 selama Februari-Agustus 2020 ² Penduduk usia kerja yang masuk BAK dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020 ³ Penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

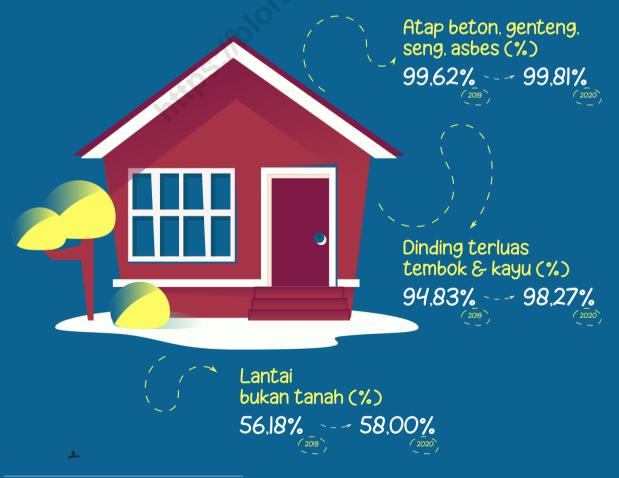
Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 55.892 orang, terdiri dari 6.932 orang pengangguran karena Covid-19, 3.087 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 2.286 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 43.587 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Selanjutnya, dari 24.058 penduduk menganggur pada 2020, lebih dari seperempatnya menganggur karena pandemi Covid-19. Dampak adanya pandemi Covid-19 tidak hanya pada peningkatan TPT tetapi juga berdampak pada mereka yang masih bekerja hingga saat ini.



KUALITAS TEMPAT TINGGAL KABUPATEN BLORA







nites: IIIblorakab hos. id

nites: IIIblorakab hos. id

Pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu dikembangkan secara terpadu. Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas umum. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya juga menjadi penentu indikator kesejahteraan manusia.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Rumah yang sehat dengan kualitas baik akan membuat masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Sebaliknya, rumah yang tidak sehat memungkinkan masyarakat mudah terpapar penyakit. Kualitas rumah tinggal dipengaruhi oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah. Beberapa kriteria kualitas rumah dapat dilihat dari hasil Susenas, seperti jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan fasilitas penunjang lainnya.

Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, kualitas rumah tempat tinggal, serta fasilitas yang dimiliki.

Status Penguasaan Tempat Tinggal

Sebagai sebuah kebutuhan dasar, setiap rumah tangga akan berusaha memenuhi kebutuhan perumahan dengan berbagai cara. Kondisi ekonomi masingmasing rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ini. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan lebih mudah dibanding mereka yang berpenghasilan rendah.

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa sebesar 93,14 persen rumah tangga di Blora telah menempati rumah dengan status milik sendiri. Dalam tiga tahun terakhir, proporsi penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri selalu mengalami peningkatan di mana pada tahun 2018 mencapai 90,44 persen

kemudian meningkat menjadi 92,63 persen di tahun 2019 dan naik lagi di tahun 2020.

Tabel 5.1
Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal. 2018-2020

r ersentase Kaman Tangga menarat status r engaasaan banganan Tempat Tinggai, 2010-2020				
Status Penguasaan	2018	2019	2020	
Bangunan Tempat Tinggal				
Milik Sendiri	90,44	92,63	93,14	
Bukan Milik Sendiri	9,56	7,37	6,86	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini mencakup kelayakan pada atap, dinding serta lantai yang dimiliki rumah tinggal tersebut.

Atap menjadi salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal karena berfungsi sebagai pelindung dari hujan maupun panas. Oleh karena itu atap biasanya dipilih dari bahan yang dapat melindungi secara maksimal. Atap dikatakan layak apabila terbuat dari beton, genteng, sirap, seng atau asbes. Meskipun demikian, jenis atap tidak selamanya menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pemilihan jenis atap dapat dipengaruhi oleh preferensi masyarakat suatu daerah sesuai kondisi geografisnya.

Tabel 5.2Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2018-2020

Indikator Kualitas	2018	2019	2020
Perumahan			
Lantai Bukan Tanah (%)	49,68	56,18	58,00
Atap beton, genteng, seng dan asbes (%)	99,62	99,62	99,81
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	97,41	94,83	98,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Dinding yang baik biasanya terbuat dari bahan yang kedap air sehingga dinding tidak lembab atau basah dan tidak berlumut. Dengan demikian standar kesehatan akan terpenuhi. Rumah dikatakan layak huni di antaranya jika dinding terbuat dari tembok atau kayu.

Ditinjau dari segi kesehatan, rumah dengan lantai dari tanah dianggap kurang layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Secara umum, kondisi perumahan di Blora telah memenuhi kriteria rumah layak huni. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020. hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Blora telah memiliki jenis atap terluas berupa beton, genteng, seng dan asbes (99,81 persen). Sedangkan proporsi rumah yang berdinding layak (terbuat dari tembok atau kayu) di Kabupaten Blora ada sebesar 98,27 persen. Adapun terkait kriteria jenis lantai, meskipun sebesar 58,00 persen rumah tangga di Kabupaten Blora telah memiliki bangunan tempat tinggal dengan jenis lantai terluas bukan berupa tanah, tetapi proporsi tersebut merupakan yang terkecil kedua dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Grobogan.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk tempat tinggal adalah luas lantai hunian. Rumah dengan luas lantai yang memadai akan memberi keluasan aktivitas dan kenyamanan bagi penghuninya.

Tabel 5.3Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah, 2018-2020

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m²)	2018	2019	2020
<20	0,24	1,24	0,31
20-49	3,44	6,56	3,38
50-99	25,26	29,00	33,57
100-149	28,56	28,03	28,98
150+	42,50	35,16	33,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa sebesar 62,74 persen rumah di Blora memiliki luas lebih dari 99 m². Hal tersebut dimungkinkan karena

karakteristik wilayah Blora yang sebagian besar merupakan daerah perdesaan. Meskipun demikian, persentase rumah dengan luas kurang dari 20 m² tampak masih ada walaupun proporsinya relatif kecil.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Tabel 5.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Perkapita. 2018-2020

r ersentase Kuman Tangga Wenurut Luas Lantai Kuman r erkapita, 2010-2020				
Luas Lantai Perkapita (m2)	2018	2019	2020	
≤ 7,2 m ²	0,31	0,71	0,11	
7,3 – 9,9 m ²	0,70	2,96	0,25	
≥ 10 m ²	98,99	96,33	99,64	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh WHO, 99,64 persen rumah tangga di Kabupaten Blora di tahun 2020 telah memiliki rumah dengan luas lantai perkapita minimal $10~\text{m}^2$.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama

untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 5.5Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2018-2020

i ciocintade italiia		menarat Beser	apa i asiiitas i ei aiiiaiiaii) =	.010 2020	
Fasilitas Perumahan		2018	2019	2020	
Penerangan Listrik		100,00	99,90	99,97	
Jamban Sendiri		79,35	81,98	86,73	
Penggunaan Gas Elpiji untuk		72,54	73,17	80,09	
Bahan Bakar Memasak					
Air Minum Kemasan/ Isi		39,83	46,38	52,85	
Ulang/ Leding	. O				
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora					

Sumber penerangan yang ideal adalah listrik, baik yang berasal dari PLN maupun non PLN, karena cahaya dari listrik lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya. Penggunaan fasilitas penerangan listrik sudah dimanfaatkan oleh hampir seluruh penduduk. Pada tahun 2020, sebesar 99,97 persen rumah tangga di Kabupaten Blora telah menggunakan sumber listrik sebagai penerangan utama.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri menunjukkan bahwa sebesar 86,73 persen rumah tangga di Kabupaten Blora pada tahun 2020 telah menggunakan jamban sendiri sebagai tempat buang air besar.

Sejak berlakunya program konversi (pengalihan pemakaian) minyak tanah ke elpiji 3 kg tahun 2007, masyarakat mulai melakukan peralihan bahan bakar

memasak dari minyak tanah, arang, kayu bakar atau lainnya ke pemakaian elpiji. Pemakaian elpiji yang lebih praktis, efisien, dan bersih, dibandingkan bahan bakar lainnya membuat pengguna elpiji terus meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan elpiji merupakan salah satu fasilitas rumah tangga yang mencerminkan masyarakat yang lebih modern. Rumah tangga pengguna gas elpiji di Kabupaten Blora pada tahun 2020 ada sebesar 80,09 persen. Jika dilihat tren dalam tiga tahun terakhir, terlihat bahwa proporsi penggunaan elpiji untuk memasak oleh masyarakat Kabupaten Blora semakin naik dari tahun ke tahun.

Adapun penggunaan air minum kemasan/air isi ulang/air leding sebagai sumber utama air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Blora ada sebesar 52,85 persen. Proporsi tersebut mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dimana proporsinya pada tahun 2018 masih sebesar 39,83 persen.

Sumber Air Minum Bersih

90,75

Akses Air Minum Layak

92,24
92,41

Gambar 5.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Air Minum, 2019-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Catatan: Air Minum Bersih: air kemasan, ledeng, sumber air terlindungi dengan syarat
jarak tempat penampungan terdekat (limba) > 10 m.

Air Minum Layak: air minum bersih + air hujan – air kemasan

2019 2020

Ketersediaan air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga. Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan

limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m. Pada tahun 2020, rumah tangga di Kabupaten Blora yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum mencapai 90,75 persen. Sedangkan rumah tangga yang memiliki akses untuk mendapatkan air layak sebagai sumber air minum ada sebesar 92,41 persen.

Hites: III of akalo logs. 90 id

https://blorakab.hps.go.id

POLA KONSUMSI MASYARAKAT KABUPATEN BLORA



Komoditas dengan Proporsi Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Terbesar

20,08%

Makanan dan Minuman Jadi 19,27⁰/₀

Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 12,14%

Aneka Barang dan Jasa **7,83**%

Barang Tahan Lama 6,98%

Rokok dan Tembakau 6,05%

Padi-Padian





Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Besarnya pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi makanan dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, biasanya akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran non makanan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi akan lebih besar.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluarannya. Hal ini terjadi karena pada umumnya elastisitas permintaan terhadap makanan cukup rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap non makanan cukup tinggi. Pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, pendapatan yang meningkat akan digunakan untuk konsumsi barang non makanan atau ditabung. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk

mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

Tabel 6.1Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2018-2020

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	
Makanan	379.473	455.160	467.340	
Bukan Makanan	338.180	450.635	434.792	
Jumlah	717.653	907.576	902.132	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan merupakan hasil bagi antara total pengeluaran konsumsi seluruh penduduk selama sebulan dengan jumlah penduduk. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Blora mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 907.576 di tahun 2019 menjadi Rp 902.132 di tahun 2020.

Selanjutnya jika dilihat dari persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan dan bukan makanan yang dirinci menurut jenis komoditasnya, dalam tiga tahun terakhir terlihat terjadinya kecenderungan penurunan distribusi pengeluaran rata-rata perkapita per bulan sebesar untuk komoditas makanan yaitu dari 52,88 persen pada tahun 2018 menjadi 51,80 persen pada tahun 2020. Sebaliknya pada kelompok komoditas bukan makanan, terjadi kecenderungan peningkatan distribusi pengeluaran rata-rata yaitu dari 47,12 persen pada tahun 2018 menjadi 48,20 persen pada tahun 2020. Terdapat suatu teori yang diungkapkan oleh Ernest Engel (1857) bahwa jika selera masyarakat tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Atau dengan kata lain, berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Blora bergerak ke arah yang lebih baik dalam tiga tahun ini.

Tabel 6.2Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Pengeluaran 2018-2020

2018-2020						
Jenis Komoditas	2018	2019	2020			
Total makanan	52,88	50,25	51,80			
Padi-padian	7,11	5,66	6,05			
Umbi-umbian	0,15	0,22	0,22			
Ikan	1,82	1,82	1,77			
Daging	1,32	2,22	1,80			
Telur dan susu	2,35	2,10	2,27			
Sayur-sayuran	4,39	3,38	4,08			
Kacang-kacangan	1,60	1,34	1,25			
Buah-buahan	2,26	2,54	2,38			
Minyak dan lemak	1,88	1,55	1,50			
Bahan minuman	1,79	1,45	1,53			
Bumbu-bumbuan	1,14	1,04	1,03			
Konsumsi lainnya	1,12	0,99	0,85			
Makanan minuman jadi	20,76	19,75	20,08			
Rokok dan tembakau	5,17	6,19	6,98			
Total bukan makanan	47,12	49,75	48,20			
Perumahan dan fasilitas	•		•			
rumah tangga	21,19	19,81	19,27			
Aneka barang dan jasa	12,64	13,53	12,14			
Pakaian, alas kaki, dan tutup	2,37	2,66	2,73			
kepala	F 70	0.00	7.02			
Barang tahan lama	5,70	8,88	7,83			
Pajak, pungutan dan asuransi	2,91	2,98	3,26			
Keperluan pesta dan	2,32	1,88	2,97			
upacara/kenduri						
Jumlah	100,00	100,00	100,00			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Adapun jika dilihat lebih rinci per komoditas, maka dapat dilihat bahwa makanan dan minuman jadi, pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta pengeluaran aneka barang dan jasa merupakan tiga komoditas yang paling besar proporsinya dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Blora.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang memenuhi konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung

berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 6.3
Rata-Rata Konsumsi Energi, Protein, Lemak dan karbohidrat Perkapita Perhari 2018-2020

Jenis Konsumsi	2018	2019	2020			
Kalori (kkal)	2.089,29	2.175,72	2.151,75			
Protein (gram)	56,95	60,85	59,90			
Lemak (gram)	53,19	56,80	57,17			
Karbohidrat (gram)	308,54	310,48	307,76			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Blora sebesar 2.151,75 kkal atau turun sebesar 23,97 kkal dibandingkan tahun sebelumnya tetapi telah memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Blora telah mengalami peningkatan, yaitu dari 56,80 gram pada tahun 2019 menjadi 57,17 gram pada tahun 2020. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa syarat kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram perhari telah terpenuhi.



TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN BLORA







Proporsi Penduduk Miskin (dalam persen)



Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)



Garis Kemiskinan (dalam ribu rupiah)



2020 Datang pandemi

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Dibanyak negara upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan dengan memacu angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan cukup untuk mengentaskan kemiskinan jika tidak diiringi dengan pendistribusian atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sampai saat ini banyak program-program yang telah ditelorkan pemerintah dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi hasilnya belum seperi yang diharapkan. Pengurangan kemiskinan berjalan lambat. Banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya sekedar memberi kail bagi si miskin, tetapi perubahan budaya, pola pikir dan semangat untuk maju juga perlu terus ditanamkan.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

Perkembangan Penduduk Miskin

Sejak 2007 sampai sebelum pandemi Covid-19, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Blora terus menurun. Hal ini tentunya merupakan capaian yang baik dimana upaya pengentasan kemiskinan bergerak ke arah yang benar. Namun seiring dengan datangnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Blora mengalami peningkatan.

197,60

176,80

155,06

145,95

135,00

127,10

115,98

113,94

102,50

103,73

134,90

123,80

115,05

111,88

97,86

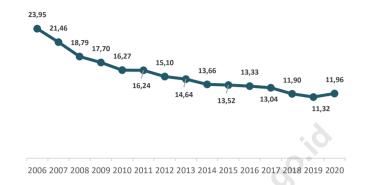
: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Sumber

Gambar 7.1Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2020

Pada periode 2007-2019, penduduk miskin di Kabupaten Blora menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora tercatat sebesar 197,60 ribu jiwa atau 23,95 persen dari jumlah seluruh penduduk Blora. Kemudian jumlah penduduk miskin semakin menurun dari tahun ke tahun dan pada 2019 telah turun menjadi 97,86 ribu jiwa atau 11,32 persen. Namun, berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai respon pemerintah atas munculnya pandemi Covid-19 sejak triwulan pertama tahun 2020 berimbas terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora ada sebanyak 103,73 ribu orang atau sebesar 11,96 persen. Jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 5,87 ribu orang.

Gambar 7.2Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora, 2006-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7.1Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2006-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
	(GK)	Kemiskinan	Kemiskinan
		(P1)	(P2)
2006	126.957	2,93	0,65
2007	132.933	3,02	0,66
2008	144.710	5,12	1,61
2009	174.951	2,38	0,51
2010	190.356	2,38	0,61
2011	206.016	2,35	0,51
2012	221.088	2,19	0,47
2013	237.850	2,39	0,59
2014	248.903	2,09	0,50
2015	257.581	2,08	0,54
2016	279.972	2,17	0,54
2017	291.114	1,53	0,31
2018	308.520	1,62	0,37
2019	335.837	1,59	0,34
2020	353.259	1,39	0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2006 hingga 2018. Pada tahun 2006, garis kemiskinan di kabupaten Blora sebesar Rp. 126.957 kemudian meningkat menjadi Rp. 221.088 pada tahun 2012 hingga kemudian menjadi Rp. 353.259 pada tahun 2020. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Blora sejak tahun 2008 cenderung menurun sehingga dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan bergerak ke arah yang semakin sempit.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Kondisi serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga cenderung mengalami penurunan sejak 2008 sampai 2020 sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata.





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BLORA

Jalan Rajawali No 12 Blora 58211 Telp (0296) 531191

Homepage : blorakab.bps.go.id E-mail : bps3316@bps.go.id